



BAPENDA
Provinsi Sumatera Utara

“
Pajak Kita
untuk mendukung
Pembangunan
Sumatera
Utara
”



RENCANA KERJA ***2024***

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan siklus perencanaan dan anggaran bahwa setiap tahun Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Proses penyusunan Renja diawali dengan penjarangan isu/masukan eksternal dan internal, yang ditengarai secara langsung mempengaruhi pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output), melalui serangkaian proses mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan sampai pada Musrenbang Provinsi. Sehingga diharapkan esensi dan operasionalisasi program maupun kegiatan yang dicakup di dalam Renja dapat bersinergi dengan harapan dan keinginan *stakeholders*.

Proses penyusunan Renja Tahun 2024 ini mengacu dan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja tahun 2024 ini merupakan Renja tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Kami menyadari bahwa Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran-saran untuk kesempurnaan dokumen ini.

Medan, Juni 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

ACHMAD FADLY, S.SOS., MSP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4. Review Terhadap RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
4.2. Inovasi Perangkat Daerah	46
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Program Tahun 2022	8
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	13
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	20
Tabel 2.4.	Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara	26
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara	33
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	36
Tabel 3.2.	Rencana Target Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	37
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	2
Gambar 1.2. Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dokumen Rencana Kerja juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program yang dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome).

1.1.1. Proses Penyusunan Renja PD

Penyusunan Renja PD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahun, dan Rencana Strategi Perangkat Daerah 5 tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra OPD dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2024. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2.
**Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja
dengan Dokumen perencanaan lainnya**

Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: Renja PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan kemudian dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini harus mensinkronkan kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disusun merupakan tahun ke 1 (satu) Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026, sehingga dasar penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini menjadi sangat penting karena merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956 tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2028.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yaitu:

1. Memberikan landasan kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama satu tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program pembangunan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024;
3. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
 - 2.3.2. Formulasi isu – isu penting
- 2.4. Review terhadap RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Inovasi Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja difokuskan terhadap capaian masing-masing program Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja program berdasarkan masing-masing indikator kinerja dan satuan pengukurannya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Table 2.1. Capaian Kinerja Program Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	91,66 %	91,66
Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	51%	49,82%	97,96
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	≥10%	7,25%	72,5

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa target kinerja hampir dapat tercapai 100%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2022 Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya sudah mulai bangkit dari dampak pandemi, sehingga terjadi peningkatan perekonomian yang cukup baik yang berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Secara umum realisasi belanja langsung Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mencapai 94,38% dengan rata-rata capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 95,30%.

Adapun penjelasan target, capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.077.275.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.049.233.914,- (97,40%)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 193.705.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 121.350.700,- (62,65%)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.239.295.800,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.837.529.147,- (87,60%)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara dengan anggaran sebesar Rp 235.228.940.360,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 230.307.509.587,- (97,91%)
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 1.546.911.950,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.442.688.011,- (93,26%)
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.013.397.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 3.828.267.000,- (95,39%)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 613.040.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 610.093.000,- (99,52%)

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 396.340.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 321.246.000,- (81,05%)

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 659.500.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 651.534.000,- (98,79%)
- Pemindahan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 386.059.900,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 384.568.300,- (99,61%)
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dengan anggaran sebesar Rp 1.293.485.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.006.626.400,- (77,82%)

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp 541.404.584,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 499.055.098,- (92,18%)
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp 45.833.058.120,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 42.785.512.848,- (93,35%)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp 9.413.260.469,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 8.852.676.029,- (94,04%)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp 12.169.866.722,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 11.814.070.423,- (97,08%)
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan anggaran Rp 740.250.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 578.644.000,- (78,17%)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 4.797.116.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 4.013.114.070,- (83,66%)

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp 7.863.092.500,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 5.000.819.289,- (63,60%)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.41.067.273.243,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 38.838.563.359,- (94,57%)

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.578.040.602,- (98,63%)
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.29.163.000.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 26.286.689.899,- (90,14%)

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp.239.485.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 214.475.252,- (89,56%)

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.386.223.664,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.656.317.598,- (69,41%)
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.951.928.350,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.1.709.658.882,- (87,59%).
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.832.695.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.106.581.578,- (74,37%)

- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.427.782.350,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.108.186.179,- (86,84%)
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 425.694.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 359.801.056,- (84,52%)
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 7.915.566.000,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 733.021.850,- (92,64%)

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja tahun 2022 antara lain:

1. Adanya Pergeseran Anggaran pada Sebagian kegiatan, mengakibatkan beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan.
2. Kurangnya Monitoring pada setiap kegiatan.

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Penyediaan dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	19,9%	20%		19,94%	20%		59,80%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	16 Kali	80%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Relaisasi SKPD	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	12 Kali	80%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100%	12 Bulan	42 Bulan	80%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	40%	60%	60%	100%	80%		80%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100%	12 Bulan	43 Bulan	80%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN	60 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100%	12 Bulan	43 Bulan	80%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dalam penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disiplin Administrasi Kepegawaian								
	Pemindahan Tugas ASN	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%	2 Kali	8 Kali	60,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang undangan	5 Kali	1 Kali	-	-	0,00%	-	1 Kali	20,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terfasilitasinya proses kenaikan pangkat dan pensiun ASN	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	40%	60%	60%	100%	80%		80%
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	48 Bulan	80,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	48 Bulan	80,00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	48 Bulan	80,00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terfasilitasinya kebutuhan bahan bacaan dan perpustakaan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	48 Bulan	80,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	48 Bulan	80,00%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terawatnya gedung kantor dan bangunan lain	20 Unit	1 Unit	-	-	0,00%	-	1 Unit	5,00%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terawatnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	20,00%			5,00%	4,00%		29,00%
	Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Terbinanya pengelolaan keuangan daerah kab/ kota	100 %	20,00%			5,00%	4,00%		29,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	60,00%
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	40 %	60%	60%	100%	80%	70 %	80%
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya pengelolaan pendapatan daerah	100%	40 %	60%	60%	100%	80%	70 %	80%
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	terlaksananya perencanaan pengelolaan pajak daerah	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Terfasilitasinya analisa pengembangan pajak daerah serta kebijakan penyusunannya	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019 sd 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Tersedianya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Terfasilitasinya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	4 Kali	16 Kali	80,00%

Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2022 maka dapat diarahkan langkah korektif yang menjadi kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2022 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan potensi objek pajak daerah dan asumsi lainnya yang relevan;
2. Pemetaan kebutuhan belanja langsung dihitung lebih cermat dengan prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pelayanan, revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2024	
1	Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	≥10%	≥10%	≥10%	(1,25%)	≥10%	≥10%	≥10%	Memenuhi Target
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	51%	53%	55%	42,82%	53%	55%	55%	Memenuhi Target

Pada Tahun 2022, kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator Proporsi

kenaikan pendapatan daerah antar tahun memenuhi target yang mana realisasinya $\geq 10\%$ dari target tahun 2022. Pada indikator proporsi PAD terhadap pendapatan daerah telah memenuhi target yang mana realisasinya adalah 55% dari target tahun 2022 sebesar 55%.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan, konsentrasi tugas pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara sebagai instansi pemungut PAD, berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu melakukan pengembangan terhadap kebijakan keuangan daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Sektor pajak daerah tetap menjadi kunci penting dalam penerimaan pendapatan daerah sehingga kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang didalamnya terdapat intensifikasi pemungutan 5 (lima) sektor pajak daerah yang merupakan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),

akan tetapi masih perlu klarifikasi perhitungannya dengan vendor, selain itu pendapatan dari Pajak Rokok Daerah perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Peningkatan Retribusi daerah yang dilaksanakan melalui forum Retribusi Daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kemungkinan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan (shareholders) beberapa BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara.

1.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, terdapat permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari hasil catatan dan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah;
2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah hal ini terutama penyediaan sarana dan prasarana di tempat pembayaran pajak;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai sumber retribusi daerah;
5. Belum optimalnya penegakan hukum;
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;
7. Kebutuhan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dituntut semakin cepat untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah yang optimal.

1.3.2. Formulasi Isu – isu Penting

Beberapa isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2022 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan gedung pada UPT Samsat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat/wajib pajak;
2. Rehab berat beberapa UPT Samsat yang memiliki potensi pajak yang besar dalam rangka optimalisasi pelayanan pendapatan;
3. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem layanan yang memudahkan pembayaran pajak berbasis teknologi dan mengoptimalkan peran e-samsat yang merupakan amanat koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK;
4. Penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan dan pajak lainnya;
5. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung untuk menggantikan kendaraan yang sudah tidak laik pakai;
6. Pembuatan gerai samsat di lokasi – lokasi strategis;
7. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);
8. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat;
9. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara untuk pemutakhiran data pajak;
10. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;
11. Update data potensi wajib pajak air permukaan;
12. Rekonsiliasi data potensi PBBKB;

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak daerah;

2. Menerapkan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang;
6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah, berbagai upaya yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang taat membayar pajak.
2. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka menjaga kenyamanan wajib pajak;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC), QRIS, maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan memafaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB);

4. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pembayaran PKB melalui media marketplace/e-Money seperti: Shopee, Ovo, Gopay, LinkAja, Dana dsb.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026. Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, data yang digunakan adalah data perencanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2028. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2024 pada dokumen tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, proses perbandingan antara dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai /tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				540.949.555.555	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				540.967.274.305	Dilakukan Penyesuaian Anggaran
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu			2.932.825.300	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu		100%	2.932.825.300	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Tahun	853.586.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Tahun	853.586.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Provsu	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	4 Kali	252.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Provsu	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	4 Kali	252.110.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	2 Kali	1.827.129.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	2 Kali	1.827.129.300	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provsu		100%	276.057.553.305	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provsu		100%	276.057.553.305	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Tersedianya Gaji PNS	1 Tahun	241.038.409.805	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Tersedianya Gaji PNS	1 Tahun	241.038.409.805	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	1 Kali	34.477.268.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	1 Kali	34.477.268.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kali	288.505.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kali	288.505.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provsu	Tersedianya Data/Bahan Pemeriksaan	2 Kali	253.370.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provsu	Tersedianya Data/Bahan Pemeriksaan	2 Kali	253.370.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provsu		100%	1.179.805.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provsu		100%	1.179.805.000	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provsu	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Kali	637.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provsu	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Kali	637.500.000	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Provsu	Terdatanya Pegawai yang Pensiun	2 Kali	102.315.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Provsu	Terdatanya Pegawai yang Pensiun	2 Kali	102.315.000	
	Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Tersusunnya Data Pegawai	1 Kali	54.610.000	Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Tersusunnya Data Pegawai	1 Kali	54.610.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kali	385.380.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kali	385.380.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provsu		100%	41.437.868.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provsu		100%	41.445.587.700	Terdapat penyesuaian anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Tersedianya Alat Listrik Kantor	1 Tahun	406.848.874	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Tersedianya Alat Listrik Kantor	1 Tahun	406.848.874	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	23.139.708.326	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	23.139.708.326	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	8.166.561.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	8.174.280.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provsu	Tersedianya Barang Cetak	1 Tahun	4.382.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provsu	Tersedianya Barang Cetak	1 Tahun	4.382.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provsu	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	1 Tahun	757.230.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provsu	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	1 Tahun	757.230.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	12 Kali	4.584.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	12 Kali	4.584.920.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	178.746.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	178.746.800.000	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	10 Unit	7.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	10 Unit	7.000.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Tersedianya Gedung Kantor Baru	5 Unit	171.746.800.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Tersedianya Gedung Kantor Baru	5 Unit	171.746.800.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	21.278.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	21.288.600.000	Terdapat Penyesuaian Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan UPT	1 Tahun	7.667.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan UPT	1 Tahun	7.667.800.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Provsu	Pelayanan Kantor Menjadi Lebih Baik	1 Tahun	13.610.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Provsu	Pelayanan Kantor Menjadi Lebih Baik	1 Tahun	13.620.800.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	13.767.132.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	13.767.132.000	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	2 Kali	4.907.847.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	2 Kali	4.907.847.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Gedung Kantor	20 UPT	307.797.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Gedung Kantor	20 UPT	307.797.500	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	4 Kali	8.551.487.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	4 Kali	8.551.487.500	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
8	Pembinaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Provsu		100%	252.478.000	Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provsu		100%	252.478.000	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	252.478.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	252.478.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provsu		100%	5.296.493.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provsu		100%	5.296.493.000	Tidak ada Perubahan Kegiatan maupun anggaran
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	1 Tahun	552.100.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	1 Tahun	552.100.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	587.037.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	587.037.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	502.348.000		Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	502.348.000	
	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	Pengelolaan Data Pajak Daerah	1 Tahun	1.527.231.000		Provsu	Pengelolaan Data Pajak Daerah	1 Tahun	1.527.231.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	1 Tahun	249.568.000		Provsu	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	1 Tahun	249.568.000	
	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	1 Tahun	1.878.209.000		Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	1 Tahun	1.878.209.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang memiliki urusan penunjang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik usulan masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		<i>NIHIL</i>			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” terdiri atas delapan rumusan sebagai berikut:

**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**ASEAN
INDONESIA
2023**

ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**.
Arah kebijakan RKP Tahun 2024:

- Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- Penguatan Daya Saing Usaha
- Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Pelaksanaan Pemilu 2024

Sumber: Keterangan Pers Menteri PPN/ Kepala Bappenas usai Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (2/3/2023)

setkab.go.id
 @setkabgoid
 @sekretariat.kabinet
 Sekretariat Kabinet RI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 yaitu **“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional, Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing”** yang memiliki sasaran Meningkatkan Pendapatan daerah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran;
2. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah;
3. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya;
4. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bakar Kendaraan Bermotor dan dari tahun sebelumnya;
5. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya;
6. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tujuan/ Sasaran	Indikator		Realisasi				Target
			2019	2020	2021	2022	2024
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional, Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing” yang memiliki sasaran Meningkatkan Pendapatan daerah	1	Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	2,96%	(1,25%)	≥10%	≥10%	≥10%
	2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	44,05%	44,85%	53%	55%	57%
	3	Persentase Kenaikan Penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun sebelumnya	(26,36%)	(26,69%)	8,89%	9,75%	7,75%
	4	Persentase Kenaikan Penerimaan PBBKB dari Tahun Sebelumnya	1,15%	(8,67%)	1,20%	1,20%	7,00%
	5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	42,34%	9,89%	2%	2%	2%
	6	Persentase Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya	-3,13%	33,40%	7,80%	8,65%	1,21%

Table 3.2.
Rencana Target Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Jenis Pendapatan	Target APBD		Selisih YoY
		TA. 2023	TA. 2024	
I	Pendapatan Asli Daerah	7.857.572.685.351,00	8.974.327.385.958,00	1.116.754.700.607,00
1.	Pajak Daerah	7.138.147.932.329,00	8.057.906.541.491,00	919.758.609.162,00
2.	Retribusi Daerah	40.477.979.540,00	44.197.979.540,00	3.720.000.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	354.759.991.476,00	331.891.359.887,00	(22.868.631.589,00)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	324.186.782.006,00	540.331.505.040,00	216.144.723.034,00
II	Dana Perimbangan	5.473.334.461.040,00	5.445.863.208.486,00	(27.471.252.554,00)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.250.228.714.040,00	488.410.160.736,00	(78.771.873.304,00)
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.683.046.680.000,00	2.734.347.300.750,00	51.300.620.750,00
3.	Dana Alokasi Khusus Reguler (Fisik)	427.465.166.000,00	427.465.166.000,00	-
4.	DAK Non Fisik	1.795.640.581.000,00	1.795.640.581.000,00	-
5.	Dana Insentif Daerah	29.555.902.000,00	30.000.000.000,00	444.098.000,00
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	98.059.465.000,00	23.568.000.000,00	(74.491.465.000,00)
1.	Pendapatan Hibah	73.059.465.000,00	5.568.000.000,00	(67.491.465.000,00)
2.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	13.458.522.513.391,00	14.473.758.594.444,00	1.015.236.081.053,00

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 guna mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang milik daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah :

- 1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, yang difokuskan pada upaya penyebaran informasi tentang pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan kegiatan utamanya adalah:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini direncanakan untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2024 dalam urusan pendapatan daerah sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini diusulkan 3 (tiga) program. Pemilihan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang mana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mendukung pencapaian prioritas kedelapan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik. Program dan kegiatan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function).

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan pagu indikatif Rp.495.000.000.000 dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun 2024. Adapun sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Intensifikasi melalui pendataan ulang dan razia terhadap potensi pajak daerah (kendaraan bermotor–termasuk alat-alat berat/besar dan pajak APU);

2. Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT SUMUT BERMARTABAT;
3. Pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefinitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota dan pengoperasian gerai samsat, samsat keliling serta perbaikan sarana dan prasarana;
4. Peningkatan Kualitas SDM (In-house Training dan Juru Sita Pajak);
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
6. Integrasi dan Sentralisasi Database Kendaraan Bermotor antara Polri-Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja;
7. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Kesamsatan dan Pendapatan Daerah;
8. Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KB-TMDU);
9. Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
10. Penyempurnaan/Revisi Regulasi tentang Pemungutan Pendapatan Daerah;

Dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD baik nomenklatur kegiatan maupun pagu indikatif kegiatan yang semata-mata dikarenakan perubahan prioritas dan menyesuaikan isu yang berkembang pada Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di bidang pendapatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah				334.787.498.701	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.117.000.000	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	4 Dokumen	797.914.000	PAD
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Provsu	2 Kali	352.110.000	PAD
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Provsu	4 Kali	1.966.976.000	PAD
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				241.486.833.161	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji PNS	Provsu	1 Tahun	239.796.924.161	PAD
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	Provsu	12 Bulan	520.725.000	PAD
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	12 Bulan	2.016.817.000	
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provsu	2 Kali	502.220.000	PAD
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Data/Bahan Pemeriksaan	Provsu	2 Kali	666.964.000	PAD
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.381.390.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Provsu	1 Kali	637.500.000	PAD
5 02 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Tersusunnya Data Pegawai	Provsu	2 Kali	206.720.000	PAD
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Provsu	4 Kali	537.170.000	PAD
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				31.283.595.540	PAD
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik Kantor	Provsu	12 Bulan	100.000.000	PAD
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provsu	4 Kali	25.547.749.840	PAD
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	Provsu	12 Bulan	1.193.403.500	PAD
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	Provsu	12 Bulan	3.232.953.200	PAD
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan kantor	Provsu	12 Bulan	150.000.000	PAD
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	Provsu	12 Kali	1.059.489.000	PAD
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.600.000.000	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	Provsu	5 Unit	1.600.000.000	PAD
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Baru	Provsu	1 Unit	5.000.000.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.629.637.500	PAD
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	12 Bulan	1.792.000.000	PAD
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provsu	12 Bulan	42.837.637.500	PAD
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.605.038.500	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Provsu	4 Kali	2.045.025.000	PAD
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor dan bangunan lain	Provsu	25 UPT	4.244.017.500	PAD
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terawatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	33 UPT	3.315.996.000	
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				206.769.000	
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota				206.769.000	
5 02 02 1.02 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang Undangan	Provsu	1 Tahun	206.769.000	PAD
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				11.933.193.000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				11.933.193.000	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	Provsu	1 Tahun	290.000.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	Provsu	1 Tahun	2.201.120.000	PAD
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah ke Kab/Kota	Provsu	1 Tahun		PAD
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengelolaan Data Pajak Daerah	Provsu	2 Kali	3.939.060.000	PAD
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	Provsu	4 Kali	825.694.000	PAD
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Provsu	4 Kali	4.677.319.000	PAD

4.2 Inovasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terus berinovasi dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan cara Melakukan Pelayanan **Pembayaran E-Commerce**. Pelayanan pembayaran E-Commerce ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga dengan adanya layanan ini maka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui seluruh bank nasional dan juga E-commerce dimana dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui Financial Technology (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Bukalapak dan juga melalui Alfamart, Indomaret dan Alfamidi.

Melalui inovasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Masyarakat tidak perlu mendatangi gerai samsat untuk melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan penyusunan rancangan final RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bahan diskusi forum Perangkat Daerah maupun forum internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dokumen ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan serta memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah direncanakan dan dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Atas peran aktif, sumbang saran dan pemikiran dari semua pihak diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya kita bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan Masyarakat Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat dapat diwujudkan.

Medan,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ACHMAD FADLY, S.SOS, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003**